

## REPRESENTASI GENDER DI PARLEMEN PASCA PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN POLITIK

Putrie Hanum Jayani <sup>1)</sup>, Fathiya Mayla Shafira <sup>2)</sup>, Satria Anindya <sup>3)</sup>, Aniqotul Ummah <sup>4)</sup>

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

---

### Correspondence

Email: [2210413137@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210413137@mahasiswa.upnvj.ac.id) No. Telp:  
[2210413174@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210413174@mahasiswa.upnvj.ac.id)  
[2210413196@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210413196@mahasiswa.upnvj.ac.id)  
[aniqotul.ummah@upnvj.ac.id](mailto:aniqotul.ummah@upnvj.ac.id)

Submitted 16 Juni 2024

Accepted 21 Juni 2024

Published 22 Juni 2024

---

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the comparison between the number of women who ran in the 2019 elections and the number of women who were successfully elected as members of parliament, as well as to find out the factors that influence women's participation in the 2019 elections and their impact on women's representation in parliament, and to find out efforts that can be made to increase women's representation in parliament in the future. The method used is a qualitative method and data is collected through a literature study approach, which refers to the process of reading and reviewing books and various other written sources relevant to the research topic. Data analysis began by exploring various available data sources, including data, interviews, documents, drawings, photographs, and other sources. The results showed that there was a significant increase in the number of women who ran for and were elected as members of parliament in the 2019 elections. Factors such as the dominance of masculine political models, low political party support, and women's dual roles in the domestic and professional spheres affected women's participation in the election. Efforts such as the implementation of affirmation policies, political education that is not gender-biased, and the active role of political parties can help increase women's representation in parliament in the future.*

**Keywords:** Gender equality; 2019 General elections; Political development

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2019 dengan jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota parlemen, selain itu juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilu 2019 dan dampaknya terhadap representasi perempuan di parlemen, serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen pada masa mendatang. Metode yang digunakan metode kualitatif dan data dikumpulkan melalui pendekatan Studi literatur, yang mengacu pada proses membaca dan mengkaji buku-buku serta berbagai sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dimulai dengan mengeksplorasi berbagai sumber data yang tersedia, termasuk data, wawancara, dokumen, gambar, foto, dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan jumlah perempuan yang mencalonkan diri serta yang terpilih sebagai anggota parlemen dalam Pemilu 2019. Faktor-faktor seperti dominasi model politik maskulin, rendahnya dukungan partai politik, dan peran ganda perempuan antara di ruang domestik dan profesional turut mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilu. Upaya-upaya seperti penerapan kebijakan afirmasi, pendidikan politik yang tidak bias gender, dan peran aktif partai politik dapat membantu meningkatkan representasi perempuan di parlemen pada masa mendatang.

**Kata kunci:** Kesetaraan gender; Pemilu 2019; Pembangunan politik

**PENDAHULUAN**

Saat ini, dalam proses demokratisasi di Indonesia, kehadiran dan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif serta institusi publik untuk pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan publik sangat dibutuhkan. Partisipasi politik perempuan merupakan wujud dari pemenuhan hak-hak kewarganegaraan mereka. Sebagai warga negara, perempuan berhak untuk berperan aktif dalam memperbaiki kehidupan politik, sehingga tidak perlu ada diskriminasi terhadap mereka dan kelompok minoritas lainnya. Namun, kenyataannya di dunia politik masih terjadi dominasi peran publik oleh laki-laki (Ardiansyah, 2016). Dominasi ini mengakibatkan perempuan tidak memiliki cukup ruang untuk menyampaikan gagasan-gagasan politik mereka, termasuk dalam hal partisipasi politik. Pembahasan mengenai peran perempuan dalam politik telah dibahas oleh banyak pihak dan sering kali menimbulkan perdebatan panjang. Dalam konteks perempuan dan laki-laki sebagai warga negara, masyarakat, atau penduduk suatu negara, seharusnya keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara. Namun, pada kenyataannya, perempuan sering dipandang sebagai warga negara kelas dua, seolah-olah mereka tidak berkontribusi atau berminat untuk terlibat dalam politik (Daryono, Yon. 2019).

Tidak heran jika banyak gerakan perempuan berusaha memperjuangkan posisi dan peran mereka dalam politik praktis, karena pada akhirnya, perempuan juga akan merasakan dampak dari suatu rezim politik, baik atau buruk. Perhatian dunia terhadap perempuan sangat tinggi karena mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki, terutama dalam hal hak asasi manusia dan hak politik. Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak untuk berkontribusi dalam memperbaiki kehidupan politik, sehingga mereka dan kelompok minoritas tidak perlu mengalami perlakuan diskriminatif. Namun, kenyataannya, dalam dunia politik masih terdapat dominasi maskulinitas dalam peran publik. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik, terutama di partai politik dan legislatif, sudah menjadi suatu keharusan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan jumlah perempuan di ranah politik. Kebijakan ini mengharuskan partai politik mencalonkan setidaknya 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif dan menempatkan minimal satu calon perempuan di antara setiap tiga nama dalam daftar calon (Julia Iksarana, 2018). Kuota perempuan dalam politik diterapkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara yang berusaha meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Secara global, masalah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam menyuarakan pandangan mereka di pemerintahan. Pemilu 2019 mencatat sejarah baru dengan peningkatan jumlah perempuan yang terpilih di DPR RI, mencapai angka tertinggi dalam sejarah parlemen Indonesia. Kebijakan afirmatif yang diatur dalam UU Pemilu mendorong partai politik untuk mencalonkan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif, baik untuk DPR RI maupun DPRD. Selain itu, kebijakan ini juga menerapkan sistem zipper, yang mewajibkan adanya satu calon perempuan di antara setiap tiga calon (Latifah, 2008).

Dengan sistem ini, aturan mengharuskan perempuan untuk masuk parlemen, karena pemilu dirancang agar perempuan dapat bersaing secara kompetitif dengan laki-laki. Kesetaraan, terutama kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, adalah salah satu tujuan utama demokrasi. Gender merujuk pada sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, berbeda dari seks yang bersifat biologis (Fakih, 2008). Upaya untuk mencapai kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki dalam berpartisipasi aktif dalam politik dan proses pengambilan keputusan politik memerlukan perhatian khusus dari pemangku kepentingan di berbagai negara. Salah satu masalah penting yang berkaitan dengan upaya ini adalah ketidakseimbangan representasi politik antara perempuan dan laki-laki, baik dalam hal keterwakilan di parlemen maupun di lembaga penyelenggara pemilu. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan yang sebenarnya, di mana perempuan dan laki-laki

memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan politik.

Adapun dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) bagaimana perbandingan antara jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2019 dengan jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota parlemen, (2) lalu apa saja factor yang dapat memengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilu 2019 dan dampaknya terhadap representasi perempuan di parlemen, (3) serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen pada masa mendatang, mengingat dari hasil pemilu 2019.

Berdasarkan dari permasalahan yang akan diteliti, adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui perbandingan antara jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2019 dengan jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota parlemen, selain itu juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilu 2019 dan dampaknya terhadap representasi perempuan di parlemen, serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen pada masa mendatang.

## LANDASAN TEORI

Dalam hakikatnya, hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu topik yang memiliki isu serta perhatian setiap masanya. pada makalah kali ini kami membahas 4 hal yaitu Teori representasi *gender*, parlemen, pemilu, serta teori kesetaraan *gender*, berikut ini teori dan analisis yang relevan.

### a. Teori Representasi gender

Gender adalah ilmu sosial dan humaniora yang mengkaji identitas pria dan wanita dalam hal peran sosial, bukan jenis kelamin biologis. Peran sosial pria sering kali dianggap lebih menonjol dan dominan daripada wanita. Kesetaraan gender ditunjukkan dengan penggunaan terminologi yang mencerminkan identitas gender laki-laki dan perempuan. Akibatnya, bahasa sering disebut dalam penelitian representasi gender (Lakoff, 2003). Istilah gender sering digunakan dalam masyarakat untuk merujuk pada interpretasi mental dan kultural mengenai perbedaan antara jenis kelamin, khususnya laki-laki dan perempuan. Menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif ini, gender berfungsi sebagai pembedaan non-biologis antara laki-laki dan perempuan (Dimiyati, 2020).

Representasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu Representation, yang merujuk pada perwakilan atau penggambaran suatu hal. Dalam pengertian yang lebih sederhana, representasi adalah gambaran tentang sesuatu yang terkait dengan aspek kehidupan tertentu, yang kemudian diungkapkan melalui berbagai media (Nawiroh, 2015). Kesetaraan gender adalah keadaan di mana perempuan dan laki-laki dapat menikmati hak asasi manusia secara setara serta memiliki kondisi yang sama dalam hal kepemilikan barang bernilai, peluang, akses terhadap sumber daya, dan manfaat dari hasil pembangunan (Jane, 2021). Di Indonesia, kesetaraan gender masih tergolong rendah. Menurut indeks kesetaraan gender yang dirilis oleh Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), Indonesia menempati peringkat ke-103 dari 162 negara, menjadikannya peringkat ketiga terendah di ASEAN. Data lain, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2018 di Indonesia menunjukkan angka 90,99. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada di angka 72,1. Ini mencerminkan kenyataan bahwa perempuan saat ini masih tertinggal di belakang laki-laki (mediaindonesia.com, 2020).

### b. Kesetaraan Gender

Istilah "gender" berasal dari kata bahasa Inggris "sex". Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender digambarkan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku (Dian Rakyat, 2010), serta ketidaksetaraan sosial di antara keduanya. Gender juga merujuk pada interaksi sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal fungsi dan tugas. Ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah ada sejak lama. Ketidaksetaraan gender tercipta dari berbagai variabel, termasuk pembentukan, sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial dan budaya melalui ajaran agama dan negara. Sosialisasi gender dipandang sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis dan tidak dapat dimodifikasi, dan kesenjangan gender ditafsirkan sebagai sesuatu yang melekat pada laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi pria dan wanita sebagai manusia. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi dan terlibat dalam berbagai bidang, termasuk politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, kesetaraan gender juga mencakup akses yang sama terhadap manfaat pertumbuhan serta penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kondisi yang adil bagi kedua jenis kelamin yang dicapai melalui prosedur kultural dan struktural yang menghilangkan hambatan yang dialami oleh kedua belah pihak. Dengan menggunakan teori dan analisis ini, studi tentang kesetaraan gender di parlemen dapat diselidiki lebih lanjut untuk menentukan titik kesetaraan.

### c. Pembangunan Politik

Pemilihan umum atau yang sering dikenal dengan istilah pemilu ini sangat erat kaitannya dengan politik dan transisi kepemimpinan. Menurut situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilu merupakan salah satu pilar terpenting dalam mengumpulkan kehendak publik di negara demokrasi. Pemilu adalah prosedur demokratis untuk memilih pemimpin. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1945

## METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Mengulas penelitian kualitatif berarti membahas sebuah metode penelitian yang juga membahas pandangan filsafati yang mendasari *disciplined inquiry* dan realitas subjek penelitian dalam berbagai konteks ilmu sosial, termasuk penelitian di bidang pendidikan dan agama, serta mempertimbangkan metode penelitian yang digunakan (subadi, 2006). Ilmu pengetahuan terus berkembang seiring perkembangan manusia di dunia ini, dengan pertumbuhan manusia, muncul berbagai fenomena baru yang harus dipahami, untuk memahami fenomena-fenomena ini, diperlukan pendekatan ilmiah yang sesuai dan penelitian yang menggunakan metodologi yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk mengakui peran penting metode penelitian kualitatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan (Fadli, 2021).

Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Basrowi & Suwandi (2008: 2). memungkinkan peneliti untuk lebih memahami subjek penelitian, merasakan pengalaman yang

dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. penelitian kualitatif melibatkan peneliti dalam konteks, situasi, dan pengaturan yang khusus.

Berdasarkan metode yang diterapkan dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pendekatan Studi literatur, yang mengacu pada proses membaca dan mengkaji buku-buku serta berbagai sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk menyusun kerangka teoritis.

Pada proses analisis data dalam penelitian ini, dimulai dengan mengeksplorasi berbagai sumber data yang tersedia, termasuk data, wawancara, dokumen, gambar, foto, dan sumber-sumber lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perbandingan Antara Jumlah Perempuan yang Mencalonkan Diri dalam Pemilu 2019 dengan Jumlah Perempuan yang Berhasil Terpilih sebagai Anggota Parlemen

Dalam Pemilu 2019 di Indonesia, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang mencalonkan diri serta yang terpilih sebagai anggota parlemen. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah kandidat perempuan di DPR RI adalah sebanyak 2.563 orang, sementara untuk DPD adalah 152 orang. Peningkatan ini mencerminkan tren positif dalam keterwakilan perempuan di ranah politik Indonesia. Dari segi keterpilihan, terdapat 118 perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI, yang merupakan 20,5% dari total 575 kursi. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada tahun 2014, di mana hanya 97 perempuan yang terpilih. Meskipun peningkatan jumlah anggota parlemen perempuan tidak terlalu signifikan, hal ini tetap merupakan langkah maju untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam lembaga legislatif. (Sutrisno, S. (n.d.), 2016).

Partai NasDem berhasil menempatkan anggota DPR perempuan paling banyak, dengan komposisi jumlah perempuan anggota DPR dari partai tersebut mencapai 32,2% atau sebanyak 19 perempuan (Raihan, 2022). Ini menunjukkan bahwa beberapa partai politik telah mulai memprioritaskan keterwakilan perempuan dalam pencalonan mereka. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang terpilih, masih terdapat disparitas yang cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada peningkatan, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia.

Penelitian dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019 adalah yang terbanyak sepanjang sejarah, namun peningkatan keterwakilan perempuan tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan Pemilu 2014. Ini menegaskan bahwa meskipun ada kemajuan, masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya. KPU dan berbagai pihak terkait disarankan untuk merumuskan kebijakan, instrumen, dan perangkat yang memungkinkan peningkatan keterwakilan perempuan. Dengan keterbatasan regulatori, KPU tetap dapat memainkan peran signifikan dalam upaya ini, terutama melalui kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum. Secara keseluruhan, Pemilu 2019 telah menunjukkan kemajuan dalam keterwakilan perempuan di Indonesia, namun masih diperlukan upaya yang konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dalam posisi politik. Keterwakilan perempuan

yang lebih besar diharapkan dapat membawa perspektif yang lebih beragam dan inklusif dalam pembuatan kebijakan dan legislatif di Indonesia. (Surbakti, R. 2005).

## 2. **Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2019 dan Dampaknya Terhadap Representasi Perempuan di Parlemen**

Partisipasi perempuan dalam Pemilu 2019 di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan beragam. Faktor-faktor tersebut meliputi dominasi model politik maskulin, rendahnya dukungan partai politik, kurangnya sumber daya keuangan perempuan, peran ganda perempuan antara di ruang domestik dan profesional, masih kentalnya ideologi dan tradisi patriarki, serta rendahnya persepsi diri mengenai partisipasi perempuan dalam politik. Dominasi model politik maskulin mencerminkan budaya politik yang cenderung mengutamakan karakteristik dan nilai-nilai yang dianggap maskulin, seperti agresivitas dan kompetitif, yang seringkali membuat perempuan merasa terpinggirkan dari arena politik. Rendahnya dukungan partai politik terhadap kandidat perempuan juga menjadi penghambat, dimana partai politik seringkali kurang memberikan sumber daya dan dukungan yang memadai bagi kandidat perempuan. (Nurhasinah, Y. 2024).

Kurangnya sumber daya keuangan perempuan merupakan kendala lain, mengingat biaya kampanye yang tinggi seringkali menjadi beban bagi kandidat perempuan yang mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya finansial yang sama dengan kandidat laki-laki. Peran ganda perempuan, di mana mereka harus membagi waktu antara tanggung jawab domestik dan aspirasi profesional, termasuk politik, juga membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam pemilu. Ideologi dan tradisi patriarki yang masih kental di masyarakat Indonesia turut mempengaruhi partisipasi perempuan. Hal ini seringkali mengakibatkan stereotip gender yang merugikan perempuan dan mengurangi peluang mereka untuk terlibat dalam politik. Rendahnya persepsi diri perempuan tentang kemampuan mereka dalam politik juga menjadi faktor penghambat, di mana perempuan seringkali meremehkan kemampuan mereka sendiri untuk berkontribusi dalam politik. (Anugraha, A. 2009).

Dampak dari partisipasi perempuan dalam Pemilu 2019 terhadap representasi perempuan di parlemen cukup signifikan. Meskipun belum mencapai target kuota 30%, peningkatan jumlah perempuan di parlemen menunjukkan kemajuan. Legislator perempuan lebih cenderung memprioritaskan isu-isu terkait pendidikan dan kesetaraan gender, yang berpotensi memberikan dampak substantif pada kebijakan yang dikeluarkan parlemen (Lilik, 2023).

Namun, rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen masih berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan representasi perempuan, seperti penguatan dan peningkatan angka batas kuota, penempatan caleg perempuan pada nomor urut teratas, dan penambahan caleg perempuan dalam daftar calon di semua daerah pemilihan. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam Pemilu 2019 dan dampaknya terhadap representasi perempuan di parlemen menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya dalam politik Indonesia. Keterlibatan perempuan yang lebih besar diharapkan dapat membawa perspektif yang lebih beragam dan inklusif dalam pembuatan kebijakan dan legislatif di Indonesia. (Muhaimin, 2014).

## 3. **Upaya - upaya yang Dapat dilakukan untuk Meningkatkan Representasi Perempuan di Parlemen pada Masa Mendatang**

Meningkatkan representasi perempuan di parlemen merupakan langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik. Berbagai upaya telah diusulkan untuk mencapai tujuan ini, termasuk penerapan kuota yang mengamanatkan sejumlah kursi parlemen untuk perempuan. Selain itu, peningkatan literasi politik dan advokasi yang tidak bias gender juga dianggap sebagai langkah krusial dalam memperkuat partisipasi politik perempuan. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya konsistensi dalam meningkatkan kapasitas politik perempuan, serta membangun kolaborasi dan soliditas organisasi untuk mendukung keterwakilan perempuan di parlemen pada 2024. (Selfiyana, S., & Ardiansyah, A. 2022).

Untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen Indonesia pada masa mendatang, berbagai upaya strategis dapat dilakukan. Berdasarkan hasil Pemilu 2019 dan sumber-sumber terkini, langkah-langkah berikut ini bisa menjadi bagian dari solusi:

- a. Kebijakan Afirmasi: Menerapkan kebijakan afirmasi seperti kuota perempuan dalam pencalonan legislatif dapat menjadi langkah awal. Meskipun peluang untuk revisi undang-undang pemilu tahun ini relatif kecil, kebijakan afirmasi tetap menjadi kunci untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.
- b. Pendidikan Politik: Pendidikan politik yang tidak bias gender dan memperkenalkan perempuan pada proses politik, memberikan keterampilan kepemimpinan, dan membangun rasa percaya diri dapat meningkatkan minat dan keterlibatan mereka dalam dunia politik.
- c. Peran Partai Politik: Partai politik memiliki peran penting sebagai 'gatekeepers' dalam rekrutmen, seleksi, dan kandidasi calon anggota parlemen. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi partai dan proses kandidasi dapat membantu memperkuat representasi perempuan.
- d. Konsolidasi dan Kolaborasi: Konsolidasi internal partai politik dan kolaborasi antar partai politik sangat penting untuk meningkatkan soliditas gerakan peningkatan kapasitas politik perempuan. Ini termasuk mengabaikan sekat-sekat yang ada antar partai politik.
- e. Membangun Basis Dukungan : Perempuan di bidang politik harus mampu membangun basis dukungan yang kuat, tidak hanya dari kalangan perempuan tetapi juga dari seluruh lapisan masyarakat, dengan mengedepankan kualitas kepemimpinan.
- f. Regulasi Ramah Gender : Menghadirkan regulasi yang mewajibkan partai politik membuka ruang bagi perempuan untuk maju sebagai calon legislatif adalah langkah penting lainnya.
- g. Advokasi dan Kampanye: Melakukan advokasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peningkatan keterwakilan perempuan di berbagai bidang, termasuk di parlemen.
- h. Mengatasi Stereotip Gender: Mengatasi stereotip gender yang seringkali menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik.
- i. Mendorong Perempuan Memilih Perempuan: Mendorong pemilih perempuan untuk memilih calon pemimpin perempuan, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung keterwakilan perempuan.
- j. Penguatan Literasi Politik: Penguatan literasi politik yang tidak bias gender untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya tersebut, diharapkan representasi perempuan di parlemen Indonesia dapat meningkat, tidak hanya dalam kuantitas tetapi juga

dalam kualitas kontribusi mereka terhadap pembangunan demokrasi dan masyarakat. (Teungku, R. A. 2022).

## KESIMPULAN

Dalam Pemilu 2019 di Indonesia, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang mencalonkan diri serta yang terpilih sebagai anggota parlemen. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kandidat perempuan di DPR RI dan DPD, peningkatan ini belum mencapai angka yang signifikan. Meskipun demikian, ada perkembangan positif dalam keterwakilan perempuan di parlemen, dengan jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Meskipun partai politik seperti Partai NasDem menempatkan anggota DPR perempuan paling banyak, masih terdapat disparitas yang cukup besar antara jumlah perempuan dan laki-laki yang terpilih.

Faktor-faktor seperti dominasi model politik maskulin, rendahnya dukungan partai politik, dan peran ganda perempuan antara di ruang domestik dan profesional turut mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilu. Meskipun partisipasi perempuan dalam pemilu 2019 telah memperlihatkan peningkatan, masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya. Upaya-upaya seperti penerapan kebijakan afirmasi, pendidikan politik yang tidak bias gender, dan peran aktif partai politik dapat membantu meningkatkan representasi perempuan di parlemen pada masa mendatang. Dengan implementasi upaya-upaya tersebut, diharapkan representasi perempuan di parlemen Indonesia dapat meningkat, memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pembangunan demokrasi, dan membawa perspektif yang lebih inklusif dalam pembuatan kebijakan politik.

## SARAN

Saran ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan, aktivis, dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan mengimplementasikan inisiatif yang mendukung peran serta perempuan dalam politik.

Pertama, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pendidikan politik yang inklusif gender. Program-program pendidikan harus dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dengan fokus pada pemahaman bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi merupakan fondasi demokrasi yang kuat. Pendidikan politik yang efektif dapat membuka jalan bagi perempuan untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik dan pemilihan umum.

Kedua, reformasi kebijakan dan regulasi harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini dapat mencakup pengenalan kuota gender dalam pencalonan legislatif dan peninjauan kembali undang-undang yang mengatur partai politik, sehingga memastikan adanya kesempatan yang setara bagi perempuan untuk terpilih dalam jabatan politik.

Ketiga, penguatan kapasitas perempuan dalam politik harus menjadi prioritas. Program pelatihan kepemimpinan dan manajemen kampanye harus disediakan untuk perempuan yang berkeinginan kuat untuk terjun ke dunia politik. Selain itu, pembentukan jaringan dukungan antar perempuan di parlemen dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan politik.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan representasi gender di parlemen Indonesia pasca Pemilu 2019 dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Langkah-langkah tersebut akan membuka peluang bagi perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam pembangunan politik yang inklusif dan berkelanjutan. Kesetaraan gender dalam politik bukan hanya tujuan yang harus dicapai, tetapi juga merupakan kunci untuk membangun tatanan demokrasi yang lebih adil dan merata.

**REFERENSI**

- Ardiansyah, Dirga. (2016). *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Daryono, Yon. 2019. *Konik Gender dan Partisipasi Perempuan sebagai Pengawas Pemilu 2019*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konik Volume 2 No 1.
- Dimiyati Huda, "Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Keadilan", (Bandung: CV Cendekia Press 2020).
- Effendi, S. (1982). *Unsur-unsur Penelitian Ilmiah*. Dalam Masri Singarimbun (Ed.). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Iskandar, Latifah. (2008). *Peran Perempuan Parlemen, dalam Rubrik opini Media Indonesia edisi 3 September 2008*
- Jane, M. R. (2021). *Representasi Kesetaraan Gender Pada Film Live - Action "Mulan" Produksi Disney*. IKON Jurnal Ilmu Komunikasi, 26 (1), 64 - 82.
- Margret, Anna, Yolanda Panjaitan, Mia Novitasari, Julia Iksarana (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*, Tim Cakra Wikara. Depok: Universitas Indonesia.
- Mediaindonesia.com. (2020, Oktober 8). *Humaniora*. Retrieved Juni 10, 2024, from mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/humaniora/351154/kesetaraan-gender-di-indonesia-masih-rendah>
- Raihan, H. (2022). *Menengok Angka Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia*. <https://goodstats.id/article/menengok-angka-representasi-perempuan-di-parlemen-indonesia-EICK4>.